

# Kota Sosial: Aspirasi Transformasi Perkotaan di Asia

## Makalah Diskusi

Rita Padawangi





## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	IV
Ringkasan Eksekutif .....	1
Pendahuluan .....	2
Kota Sosial sebagai Proyek Kolaboratif di Asia .....	3
Melibatkan Kembali Warga ke Dalam Tata Kelola Pembangunan Kota: Partisipasi dan Kolaborasi .....	5
Kota Cerdas sebagai Solusi? .....	8
Bias Perkotaan .....	10
Kesimpulan: Partisipasi, Kerja Sama dan Inklusi .....	11
Catatan Akhir .....	13

## Kata Pengantar

### **Kota harus menjadi milik warga dan penghuninya!**

Kalimat di atas menjadi penutup konferensi “Kota Sosial - Cita-Cita Transformasi Perkotaan di Asia” (*Social City - Aspiration of an Urban Transformation in Asia*) yang dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 22 November 2017 di Jakarta. Konferensi yang merupakan bagian dari program Economy of Tomorrow (EoT) tersebut diselenggarakan bersama oleh RUJAK Center for Urban Studies, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dan Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). Dalam konferensi tersebut, berbagai ahli, termasuk ahli tata kota (urbanis), aktivis akar rumput maupun pemerintah mendiskusikan konsep *Social City* yang selanjutnya dalam makalah ini akan disebut sebagai Kota Sosial, khususnya terkait perumahan dan mobilitas/ transportasi publik yang terjangkau maupun partisipasi warga.

Konferensi ini dibuka antara lain oleh Duta Besar Jerman untuk Indonesia, dan Walikota Jember, yang juga merupakan anggota Partai Nasdem. Diskusi dalam konferensi tersebut dilanjutkan dengan ilustrasi dan refleksi nyata dengan cara melakukan kunjungan lapangan pada hari kedua ke Jakarta Smart City Control Room dan dua kampung di Jakarta.

Tiga kesimpulan utama dari pertukaran pengetahuan selama dua hari mengenai Kota Sosial tersebut adalah: Kota Sosial merupakan konsep pembangunan perkotaan yang holistik dan kolaboratif yang memperjuangkan perumahan, mobilitas, serta partisipasi sipil yang terjangkau, sementara di saat yang bersamaan berupaya menghindari segregasi sosial dan budaya apapun; Kota Sosial juga mendorong warga dan penghuninya untuk kembali terlibat di dalam tata kelola pembangunan kota. Secara singkat, Kota Sosial merupakan sebuah janji penerapan inklusi di tingkat kota, sekaligus merupakan antitesis atau alternatif atas konsep pengembangan kota yang eksklusif, individualistis, dan semi-otoriter, seperti kota kelas dunia, kota kompetitif, maupun Kota Cerdas (*Smart City*).

Analisis menarik ini disampaikan oleh Dr. Rita Padawangi, Dosen Senior dan ahli tata kota Indonesia yang mengajar di Singapore University of Social Sciences, di dalam

makalah refleksi yang dipresentasikan pada Konferensi *Social City* yang diselenggarakan RUJAK/ Kemenko PMK/ FES pada November 2017 lalu. Pandangan ini merupakan pandangan seorang ahli tata kota yang memiliki kompetensi memadai untuk mengkontekstualisasi dan membandingkan transformasi perkotaan dari kota-kota seperti Jakarta, Singapura, atau Seoul dari perspektif politik-ekonomi yang progresif.

Transformasi perkotaan, bersama-sama dengan transformasi digital dan transformasi energi, dapat dikatakan merupakan aspek terpenting dari transformasi sosial besar yang sedang terjadi di Asia maupun seluruh dunia. Di masa depan, urbanisasi akan terjadi bahkan lebih pesat lagi, dan Asia akan menjadi salah satu bagian penting di dalamnya. Karenanya, pengembangan kota-kota di Asia akan mencerminkan mikrokosmos kondisi politik yang mungkin juga akan terjadi di seluruh dunia. Dalam konteks ini, pengembangan kota yang terpadu di Asia, bertanggung jawab sosial, dan karenanya menjadi inklusif, akan berkontribusi signifikan dalam upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB di dalam Agenda 2030. Untuk itu, jejaring *Economy of Tomorrow* bekerja sama dengan para mitranya akan terus mendukung cita-cita bersama, yaitu memastikan agar aspek dan fungsi sosial dalam perencanaan pengembangan perkotaan dapat lebih diperhatikan dalam proses *city-making*.

Perhatian khusus perlu diberikan pada isu perumahan terjangkau dan layak. Hal ini karena kami mendukung penilaian Leilani Farha -pelapor khusus PBB untuk hak atas perumahan yang layak- bahwa perumahan yang terjangkau dan layak bukan hanya sekadar pilihan politik dan ekonomi, namun juga hak asasi manusia. Karenanya, finansialisasi sektor perumahan, yang merupakan tren global yang kontraproduktif, diharapkan dapat segera diakhiri bersama oleh berbagai lembaga pemerintah, investor, masyarakat sipil, dan organisasi hak asasi manusia.

Jakarta, 22 Maret 2018

**Sergio Grassi**

Direktur FES Kantor Perwakilan Indonesia  
Koordinator Program *Economy of Tomorrow* (EoT) di Asia

## Ringkasan Eksekutif

Makalah diskusi didasarkan pada Konferensi Regional RUJAK Center for Urban Studies - Kemenko PMK - FES tentang “Kota Sosial - Aspirasi Transformasi Perkotaan di Asia” pada November 2017

- Kata ‘kota’ (*city*) sebenarnya secara inheren sudah bermakna sosial, namun pengembangan perkotaan kontemporer telah menyimpang jauh dari aspek-aspek historis, sosial dan budaya kota, seiring dengan tantangan yang ditimbulkan aglomerasi kota dalam hal skala, penyebaran spasial, cakupan maupun keragaman isu lainnya.
- Kota Sosial (atau *Social City*) adalah sebuah program pengembangan perkotaan yang partisipatif dan kolaboratif. Kolaboratif adalah antitesis dari kompetitif.
- Aplikasi teknologi yang inovatif dapat menjadi solusi potensial untuk beberapa masalah perkotaan tertentu, namun pengadopsian konsep Kota Cerdas (*Smart City*) saat ini di Asia, termasuk di Jakarta, cenderung menggunakan teknologi untuk memperkuat citra pembangunan dan popularitas politik, alih-alih untuk mengatasi isu-isu sosial yang nyata di masyarakat.
- Setidaknya terdapat tiga tantangan utama untuk melaksanakan program Kota Sosial di Asia:
  - Penekanan Kota Sosial pada pembangunan infrastruktur dapat meneruskan ketergantungan pada sistem kota yang tidak adil saat ini, serta batasan-batasan administratif yang kaku.
  - Inisiatif Kota Sosial menantang struktur tidak adil yang ada saat ini, dan dapat menghadapi hambatan oleh pihak yang merasa kekuasaannya terancam.
  - Visi kota dengan tata kelola yang eksklusif, tertib dan semi-otoriter, seperti mimpi banyak penduduk Jakarta untuk meniru Singapura, dapat dikatakan telah menjadi konsep hegemon yang mendominasi, sehingga menjadi tantangan tersulit yang akan dihadapi oleh program Kota Sosial.



## Pendahuluan

Mengapa Kota Sosial? Mengapa harus sekarang? Terdapat beberapa istilah yang telah terangkai kepada kata 'kota' ('city') untuk menggambarkan beberapa visi khusus kota tersebut. Kota berkelanjutan, misalnya, menggabungkan dimensi lingkungan, ekonomi, dan sosial dari sebuah kota, dengan menekankan pada jaminan akses sumber daya bagi para generasi masa depan. Sementara itu, bayangan umum mengenai kota yang layak huni berfokus pada kondisi tinggal dan kenyamanan, dan hal ini semakin banyak diadopsi oleh berbagai outlet media dan perusahaan konsultasi sebagai indeks untuk membandingkan kota-kota di seluruh dunia. Munculnya istilah-istilah ini tidak terlepas dari dampak pembangunan perkotaan setelah Perang Dunia II, dengan berkembang pesatnya industri manufaktur dan bangunan dalam skala besar yang berdampak buruk bagi lingkungan alam dan infrastruktur perkotaan.

Kota Sosial adalah istilah yang menarik, karena menyiratkan adanya pengulangan kata. Istilah bahasa Inggris kota, yaitu "city", berasal dari kata "civitas", suatu kata bahasa Latin yang berarti masyarakat beserta peradabannya di dalam suatu wilayah geografis tertentu. Artinya, sebuah kota berarti lebih dari sekadar permukiman manusia, meskipun permukiman membentuk sebuah entitas geografis. Para peneliti ilmu sosial telah menafsirkan lebih lanjut istilah ini dengan penekanan pada hubungan sosial dan ekonomi kota tersebut. Pemahaman atas kata "kota/city" mencakup kehidupan sosial di dalamnya. Jane Jacobs dalam bukunya, "The Death and Life of Great American Cities" (1961) menyesalkan hilangnya ritme sosial ketika lingkungan "kampung" perkotaan hilang akibat semakin meluasnya paradigma perencanaan modern Amerika. Sebuah metropolis adalah tempat di mana individu dapat hidup sebagai orang asing, namun juga tempat di mana ide-ide dibentuk di ruang publik, dan di mana sesama orang asing dapat bertemu untuk saling bertukar ide tersebut<sup>1</sup>. Artinya, "kota" secara inheren merupakan sesuatu yang bersifat sosial, dan bahkan jika pusatnya adalah pasar dan ekonomi, maka itu semua telah berurat akar di dalam lembaga sosial dan struktur politik 'civitas'<sup>2</sup>.

Jika kata "kota / city" tersebut sudah secara inheren bermakna sosial, lalu mengapa kita harus menggunakan istilah "kota sosial", yang jelas merupakan istilah yang tumpang tindih? Salah satu masalahnya adalah proses urbanisasi yang semakin menjauhkan kota dari kehidupan sosialnya. Kawasan perkotaan industri skala besar yang tumbuh dan terkonsolidasi dengan cepat di seluruh dunia, dari sisi demografis menyerap populasi dari ekonomi non-industri menjadi bagian dari pasar tenaga kerja. "Skala baru urbanisasi" ini sangat besar dan tersebar di seluruh dunia, dari Boston-Washington DC di Amerika Serikat, Pearl River Delta di Asia Timur, Lagos *conurbation* di Afrika Barat, hingga Jabodetabek di Jakarta<sup>3</sup>. Seiring dengan berakhirnya abad kedua puluh, persaingan untuk mencapai status dan daya saing kota global menjadi lebih mengarusutama di dalam berbagai visi perkotaan formal, dengan distrik bisnis kota menjadi ruang kota termahal yang berfungsi sebagai pusat modal keuangan dan kemajuan teknologi dan gaya hidup yang saling terjalin dengan rekreasi dan konsumsi<sup>4</sup>.

Aglomerasi perkotaan yang membentuk kota-wilayah (*city-regions*) dan kota-wilayah global (*global city-regions*) menyebabkan suatu tantangan bagi tata kelola kota, baik dari sisi skala, penyebaran spasial, cakupan maupun keragaman isu yang ada. Memahami kota sebagai sebuah *civitas* menjadi lebih menantang dengan adanya beragam geografi, komunitas, dan peradaban di dalam satu wilayah teritorial, yang mengakibatkan batas administratif terkadang tidak selalu selaras dengan identitas sosial-budaya maupun konfigurasi lingkungan. Berdasarkan penelitiannya atas Los Angeles, Edward Soja mengutip istilah 'synekisme', yang diartikan sebagai pembentukan "tata kelola politik, pembangunan ekonomi, tatanan sosial, dan identitas budaya" sebagai hasil dari kohabitasi di suatu wilayah geografis tertentu yang menyebabkan interdependensi ekonomi dan ekologis<sup>5</sup>. Namun, berbagai sistem tata kelola ini mengandung ketimpangan material dan kekuasaan yang mengakibatkan diadopsinya visi-visi bagi kota yang hanya menguntungkan sebagian pihak.

Dengan pertumbuhan cepat yang dihasilkan dari skala baru urbanisasi ini, kota-kota di Asia Tenggara menghadapi berbagai masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Transportasi seringkali menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi di kota, akibat penyediaan publik dan kapasitas ruang yang kurang memadai sehingga menyebabkan kemacetan, yang pada akhirnya membebani secara ekonomi dan melelahkan secara sosial<sup>6</sup>. Perumahan terjangkau juga menjadi isu lain yang muncul, karena kebutuhan perumahan warga kota yang bertumbuh berkali lipat setelah suatu negara merdeka dari penjajah seringkali diserahkan kepada sektor swasta yang memandang perumahan sebagai pasar properti<sup>7</sup>. Akibatnya, terciptalah tata kelola perkotaan yang bergantung pada pengusaha, di mana para pengembang swasta berkembang pesat menjadi kerajaan bisnis yang memiliki akses untuk mempengaruhi rencana tata ruang<sup>8</sup>.

Lebih lanjut, struktur pemerintahan kota dipengaruhi pula oleh periode puluhan tahun di bawah kekuasaan rezim non-demokratis yang hampir tidak memberikan ruang bagi pendekatan non-teknokrat untuk menyelesaikan masalah-masalah akibat urbanisasi. Terlepas dari adanya sejumlah gelombang reformasi politik – *People Power* di Filipina pada tahun 1980 dan 1990-an dan Reformasi di Indonesia pada akhir 1990-an – obsesi pada solusi teknokratik untuk masalah perkotaan tetap bertahan. Kelompok marjinal, khususnya kelas pekerja miskin tanpa tanah, seringkali menjadi korban atas nama kemajuan yang secara luas diterima oleh para pembuat kebijakan, dan diinternalisasikan oleh para penduduk kota yang telah mengalami beratnya berbagai isu lingkungan dan mobilitas, namun belum mengalami sendiri dampak buruk solusi teknokratik. Beberapa kekuatan yang terus menopang berlangsungnya proses perencanaan kota dari atas ke bawah (*top-down*) juga mewakili ideologi lembaga pendanaan pembangunan yang menjelaskan gambaran-gambaran kemajuan secara materil<sup>9</sup> yang secara ideologis tidak mementingkan pemahaman kota sebagai *civitas*, namun justru semakin mendorong kota sebagai mesin pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks inilah istilah “kota sosial”, meskipun tumpang tindih, menjadi masuk akal sebagai upaya untuk menyebarluaskan agenda sosial suatu kota. Makalah diskusi ini didasarkan pada topik-topik yang dibahas pada konferensi dan kunjungan lapangan “*Social City: Aspiration of an Urban Transformation in Asia*” (“Kota Sosial - Aspirasi Transformasi Perkotaan di Asia”) di Jakarta, pada tanggal 21-22 November 2017.

## Kota Sosial sebagai Proyek Kolaboratif di Asia

Inisiatif Kota Sosial di Jerman dimulai pada tahun 1999, “bukan sebagai program sosial, namun sebagai program investasi pengembangan perkotaan”, untuk menjawab kebutuhan untuk “mencegah lingkaran setan kemiskinan, pengabaian sosial, dan kerusakan infrastruktur”<sup>10</sup>. Namun, lingkungan yang menjadi target program Kota Sosial adalah lingkungan yang masih tertinggal, seiring dengan berbagai masalah sosial dan lingkungan yang mereka hadapi. Akibatnya, solusi untuk masalah-masalah ini dirumuskan sebagai “program investasi pembangunan perkotaan”, dan bukan sebagai pendanaan sosial, meskipun memang di dalamnya terdapat komponen biaya untuk mengembangkan “pusat koordinasi” di lingkungan yang berfungsi memberikan masukan dan dukungan bagi semua yang terlibat<sup>11</sup>. Selain itu, hukum yang ada mengamanahkan agar program tersebut mensyaratkan partisipasi warga dan manajemen lingkungan di proyek pembangunan.

Kota Sosial dalam konteks ini secara spesifik merujuk kepada suatu program pembangunan perkotaan yang partisipatif. Dalam pelaksanaannya, mayoritas jenis pembangunan perkotaan yang terkait dengan Kota Sosial adalah infrastruktur perumahan dan transportasi, yang dikategorikan di dalam sektor pembangunan, sebagaimana biasa dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Dalam pengalaman Jerman, program Kota Sosial yang cenderung tertinggal adalah sekolah dan pendidikan, integrasi imigran, serta pembukaan lapangan kerja bagi perekonomian lokal<sup>12</sup>. Walaupun akan memperoleh

manfaat dari pembangunan infrastruktur, sektor-sektor tersebut memerlukan koordinasi lintas-sektor yang masif, khususnya dalam dimensi sosial-budaya.

Konsep “Satuan Sosial Kota” (“*Social Quarter*”) yang diperkenalkan René Bormann<sup>13</sup> sebagai strategi perubahan sosial, memberikan fokus yang terlalu besar kepada pembangunan infrastruktur. Satuan sosial kota didefinisikan oleh penghuninya, dan karenanya harus sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Satuan sosial kota, dalam hal ini, tidak harus sama dari batasan administratif, dan “umumnya tidak memiliki batasan resmi maupun politis”<sup>14</sup>, yang serupa dengan konstruksi sosial kampung-kampung di perkotaan Indonesia. Namun, independensi dari batas-batas administratif juga menjadi tantangan bagi otoritas birokrasi yang ada, dan inisiatif perubahan dari satuan sosial kota ini dapat menghadapi hambatan dari mekanisme yang bergantung pada pola (*path-dependent*), seperti hambatan birokratis yang dihadapi di dalam usulan perumahan partisipatif dari tahun 2012 hingga 2017 di Jakarta<sup>15</sup>.

Pelaksanaan program *Social City* di Asia Tenggara dan di Asia secara umum menghadapi berbagai tantangan serius. Tataran perkotaan di Asia dan Asia Tenggara adalah tempat-tempat di mana “skala baru urbanisasi” dan pembangunan tidak merata menyebabkan tumbuhnya kota-kota utama<sup>16</sup> serta berbagai aglomerasi perkotaan sebagai wujud konsentrasi kekuasaan politik dan ekonomi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pendekatan teknokratik melalui tata kelola kota yang berorientasi pada wirausaha, beriringan dengan sektor swasta yang berorientasi keuntungan menjadi gagasan yang dituju oleh banyak kota di kawasan ini. Tujuan akhirnya adalah untuk mencapai daya saing ekonomi di pasar global. Namun akibatnya, isu pembangunan dan infrastruktur seperti perumahan dan transportasi yang terjangkau seringkali terpisah dari partisipasi kolektif di dalam pengambilan keputusan.

Jakarta, Indonesia, merupakan salah satu kasus yang sangat relevan, di mana mantan gubernur Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok, – yang banyak dipuji

atas pembangunan infrastruktur yang dilakukannya – menerapkan pendekatan dari atas ke bawah (*top-down*) yang keras dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur, termasuk dengan menggusur ribuan keluarga dan usaha pada dua tahun masa kepemimpinannya yang singkat. Pada tahun 2016 saja, pemerintahan Ahok menggusur 5.726 keluarga dan 5.379 usaha<sup>17</sup>. Di salah satu penggusuran yang paling menuai kontroversi, Kampung Akuarium, penduduk setempat telah melakukan tuntutan hukum dan membangun kembali rumah-rumah mereka, meskipun dengan struktur yang tidak permanen (Foto 1). Pelabelan kampung sebagai sarang tuberkulosis dan penjarah tanah negara, tanpa adanya peluang untuk berdiskusi, membuat para penduduk yang tergusur menjadi marah dan frustrasi. Banyak dari mereka yang kehilangan mata pencaharian akibat penggusuran tersebut, dan kelompok pertama yang memberikan bantuan adalah kelompok agamis (garis keras).

Namun, Ahok masih banyak dipuji atas apa yang dipandang sebagai prestasinya dalam membangun infrastruktur, seperti proyek MRT, pembetonan kali, perluasan sistem BRT (Transjakarta), dan juga pasukan oranye (PPSU, pekerja pembersih jalan-jalan kota)<sup>18</sup>. Ahok kemudian dituntut dan dipenjara, bukan karena rezimnya yang opresif, namun akibat kasus penistaan agama. Kasus ini menunjukkan pentingnya pembangunan partisipatif-kolaboratif, yang bukan hanya tidak terjadi pada pemerintahan Ahok, namun juga tidak menjadi prioritas bagi para lawan politik Ahok. Lebih lanjut, hal ini mencerminkan secara nyata synekisme Soja - mengelola kota yang tercipta karena berdampingannya kehidupan beberapa masyarakat yang saling bergantung satu sama lain secara ekonomis, sosial dan ekologis, tetapi karena ketimpangan kekuasaan dan status kelas dari berbagai komunitas tersebut menyebabkan hubungan yang predatoris.



Foto 1. Kampung Akuarium pada November 2017, pada saat kunjungan lapangan Social City  
Foto © Rita Padawangi

## Melibatkan Kembali Warga ke Dalam Tata Kelola Pembangunan Kota: Partisipasi dan Kolaborasi

Pembuatan kota meliputi pembangunan spasial yang sejalan dengan pembangunan peradaban, yang mencakup hubungan sosial dan budaya di kota tersebut. Dalam konteks demokratis, pemerintah daerah adalah pengemban kontrak sosial dengan warga yang bertanggung jawab untuk mengelola konfigurasi sosial, budaya, dan spasial ini. Di dalam kota-kota yang semakin besar, beragam, dan multikultural, fokus pada pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan barang publik, seringkali menjadi landasan bersama untuk menciptakan kesejahteraan warganya. Seringkali ditemukan adanya keluhan bahwa partisipasi publik di dalam pengambilan keputusan kota menghabiskan banyak waktu, dan

karenanya tidak efisien, khususnya ketika masyarakat kota menjadi lebih beragam dalam hal latar belakang sosial, afiliasi budaya, dan kecenderungan politik. Namun, dampak pembangunan infrastruktur dan diprioritaskannya beberapa layanan publik di dalam skala kota baru ini mengakibatkan ketimpangan sosial, yang membuat hal-hal yang tampak baik bagi mayoritas penduduk kota – yang merupakan pemilih pemimpin kota dalam proses demokrasi elektoral – berpotensi menjadi represif bagi sebagian kecil kelompok yang termarginalkan. Marjinalisasi dan diskriminasi terhadap minoritas tidak hanya terbatas pada kelompok berbasis identitas, namun juga berlaku dalam hal kelas ekonomi dan gender. Wacana keadilan sosial dan keadilan spasial di kalangan akademisi telah banyak membahas mengenai pentingnya prinsip berkeadilan dalam distribusi sumber serta prosedur dalam tata kelola pembangunan kota<sup>19</sup>.

Meskipun pemisahan antara pembangunan infrastruktur dan partisipasi publik masih seringkali terjadi di berbagai kota di Asia, berbagai eksplorasi dan eksperimen yang mengajak dan memfasilitasi warga untuk kembali terlibat di dalam tata kelola pembangunan-kota telah dilakukan. Untuk konteks Indonesia kontemporer, beberapa kota dan daerah telah mencoba menerapkan pendekatan baru untuk pengambilan keputusan dalam pembangunan perkotaan setelah memperoleh otonomi dari desentralisasi. Kota Solo, misalnya, telah melaksanakan pemetaan partisipatif, pemrofilan komunitas, dan identifikasi masalah dan potensi selama lebih dari lima tahun. Di Korea Selatan, Kota Seoul di bawah Walikota Park Won Soon telah menjalankan berbagai inisiatif yang melibatkan masyarakat lokal, mendukung usaha kecil menengah melalui “gerakan pemegang saham minoritas” untuk mengangkat kapasitas mereka, walaupun dominasi empat konglomerat besar *chaebol* yang menguasai sebanyak 50% produk domestik bruto (PDB) Korea Selatan tetap merupakan tantangan yang amat besar<sup>20</sup>. Selain itu, Pemerintah Kota Seoul meluncurkan program untuk mengurangi konsumsi energi kota sebesar 2 juta ton setara minyak per tahun, di bawah slogan “*One Less Nuclear Power Plant*”, setahun setelah terjadinya bencana nuklir Fukushima di Jepang<sup>21</sup>.

Dengan adanya otonomi (meskipun masih relatif) pemerintah daerah di Indonesia pasca desentralisasi untuk mengambil keputusan terkait perencanaan pembangunan juga membuat sejumlah bupati – yang memiliki peran signifikan di dalam ekonomi non-perkotaan – muncul ke permukaan setelah mengajak masyarakat untuk kembali terlibat di dalam sistem perencanaan. Sebagai contoh, bupati Jember (Jawa Timur) saat ini, Hj. Faida, menjelaskan bahwa ia berfokus pada perawatan dan layanan kesehatan, yang tentunya sangat wajar melihat latar belakangnya sebagai dokter sebelum terjun ke politik. Selama masa pengabdianya sebagai dokter, ia memperoleh dua penghargaan dari pemerintah pusat pada tahun 2014 atas jasanya meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Namun, peningkatan popularitas para bupati dan walikota tersebut, yang antara lain terlihat dalam kasus Presiden Joko Widodo, yang menanjak

cepat dari posisinya sebagai walikota menjadi Presiden RI, juga menimbulkan kemungkinan terjadinya pencitraan demi meningkatkan popularitasnya di berbagai daerah demi mencapai posisi politik yang lebih tinggi. Seiring dengan berbagai outlet media dan semakin luasnya penetrasi media sosial di pusat-pusat perkotaan, otonomi daerah juga menjadi platform kebijakan dan proyek populis yang secara visual menarik untuk disebarluaskan ke daerah-daerah lain, sehingga media dan penyebaran informasi dapat dipenuhi dengan citra keberhasilan yang dibesar-besarkan<sup>22</sup>. Sementara itu, keberlanjutan kebijakan dan proyek tersebut, serta validitas dari klaim partisipasi publik masih harus terus dibuktikan<sup>23</sup>.

Menurut Marco Kusumawijaya, salah satu pendiri Rujak Center for Urban Studies di Jakarta, istilah partisipasi tidak cukup untuk menjelaskan peran warga dalam pembangunan kota. Ia lebih memilih menggunakan istilah ‘kolaborasi’ untuk mencerminkan hubungan antar aktor dalam pembuatan dan perencanaan kota, yang terdiri dari warga sebagai masyarakat sipil, pemerintah, dan terkadang juga sektor swasta. Tata kelola kolaboratif merupakan antitesis dari upaya banyak kota untuk mencapai daya saing yang seringkali mengabaikan dimensi sosial dan budaya kota demi berbagai pencapaian ekonomi, keuangan, dan teknologi. Kolaborasi juga menjadi fokus yang diangkat Gugun Muhammad, koordinator *Urban Poor Consortium* (UPC) di Jakarta, dalam presentasinya tentang kontrak politik 2017 antara masyarakat miskin kota dengan salah satu calon gubernur Jakarta. Pada masa Pilkada Jakarta 2017, banyak analis dan pengamat Indonesia dari kalangan akademisi dan jurnalis amat menyayangkan kampanye politik yang memanfaatkan agama yang dilakukan oleh Anies Baswedan, gubernur terpilih Jakarta. Namun, perspektif Kota Sosial dapat memberikan wawasan tambahan yang menjelaskan ketegangan selama pilkada tersebut. Capaian pembangunan gubernur sebelumnya tidak terlalu memberikan peluang partisipasi, terlebih lagi kolaborasi, khususnya kepada masyarakat miskin kota. Oleh karena itu kampanye pilkada tersebut akhirnya dimanfaatkan sebagai sarana bagi para masyarakat miskin kota untuk menegosiasikan posisi



Foto 2. Kunjungan lapangan ke Kampung Tongkol pada saat Konferensi Social City pada November 2017  
Foto © Rita Padawangi

mereka, setelah mengetahui janji kampanye politik yang belum dipenuhi oleh Gubernur Ahok, dan menyusun strategi untuk mendorong tata kelola yang kolaboratif melalui kontrak politik baru<sup>24</sup>. Sementara itu, di periode pemerintah yang tidak kolaboratif, para penduduk kampung yang terorganisir dapat melakukan bentuk kolaborasi lain baik di kalangan mereka sendiri, akademisi, dan aktivis, seperti yang terjadi di Kampung Tongkol, di mana Gugun tinggal. Penduduk kampung tersebut melakukan penghijauan bantaran sungai dan menjaga ruang publik di sepanjang kanal sungai di lingkungan mereka (Foto 2).

Pelajaran dari kasus Indonesia dan Jakarta ini adalah penting sekali bagi pemerintah daerah untuk melibatkan kembali warga ke dalam tata kelola

pembangunan kota. Namun, penting pula untuk diingat bahwa klaim apapun yang dinyatakan sebagai ajakan bagi warga untuk terlibat kembali ke dalam tata kelola pembangunan kota harus diawasi dengan sudut pandang yang kritis: Siapa yang membuat klaim tersebut? Apakah klaim inklusivitas, partisipasi, dan kolaborasi tersebut dibuat oleh aktor pemerintah, atau juga didukung oleh warga dari kelompok marjinal? Alih-alih berfokus pada klaim bahwa intervensi pembangunan dapat membawa manfaat khusus bagi kota, pertanyaan berikut ini lebih relevan: Bagaimanakah proyek dan inisiatif tata kelola partisipatif atau kolaboratif ini memberdayakan kelompok yang paling tercerabut haknya di kota agar lebih memiliki kekuatan negosiasi dalam keputusan pembangunan?

## Kota Cerdas sebagai Solusi?

Mungkin salah satu isu paling menantang dalam mempromosikan tata kelola kota kolaboratif bukanlah terkait dengan kesiapan atau kapasitas warga, sebagaimana sering diungkapkan di berbagai kajian tentang proyek partisipatif. Sebaliknya, justru visi ideologis kotalah, yang juga dipengaruhi langsung oleh berbagai lembaga dan kondisi geografis, yang seharusnya menjadi dasar atau otoritas dalam menentukan apa yang dimaksud dengan kota yang baik, dan apa yang harus dicapai untuk mewujudkan visi kota yang baik tersebut. Kewenangan ideologis ini tidak hanya dibangun melalui institusi keuangan internasional yang memberikan batasan dan arahan tentang bagaimana proyek pembangunan harus dilaksanakan, sebagaimana telah disebutkan pada bagian pendahuluan makalah ini. Paradigma ini juga dilanggengkan melalui pertukaran ide antar aktor pemerintah dengan suara-suara yang senada dari pihak lainnya, seperti pengembang swasta dan anggota masyarakat sipil yang kepentingannya diakomodasi di dalam visi kota baik yang diidealkan tersebut<sup>25</sup>.

Salah satu visi ideal tersebut adalah inovasi teknologi yang ditujukan untuk memecahkan masalah di kota. *Smart City* atau Kota Cerdas, yang berfokus pada kreativitas dan kewirausahaan<sup>26</sup>, semakin banyak ditafsirkan sebagai kemampuan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengelola kota. Dalam kasus Jakarta, pelaksanaan agenda kota cerdas berfokus pada teknologi dan penggunaan media sosial secara inovatif. Namun, fokus pada pengumpulan informasi dan pengawasan secara waktu nyata melalui aplikasi telepon pintar dan kamera CCTV di dalam sistem Jakarta Smart City telah mengabaikan “berbagai potensi kreativitas dari bawah (*bottom-up*)” sebagai pemahaman konseptual dari sebuah kota cerdas yang sesungguhnya yang diperuntukkan bagi masyarakat yang cerdas<sup>27</sup>.

Kategorisasi pelaporan masalah di portal *Jakarta Smart City* melalui *crowdsourcing* justru mencerminkan marjinalisasi dan diskriminasi kelompok yang tercerabut haknya, alih-alih memberdayakan mereka. Misalnya, “pedagang kaki lima liar” dianggap sebagai

salah satu masalah di dalam portal *Smart City*<sup>28</sup>, padahal pada kenyataannya, tidak ada aturan jelas mengenai pedagang kaki lima di Jakarta, kecuali Perda Ketertiban Umum (Tibum) yang melarang pedagang menjajakan dagangan di berbagai tempat di jalanan. Peraturan ini menjadi musuh publik bagi mereka yang pencahariannya bergantung pada sektor informal berpenghasilan rendah. Akibatnya, ketentuan pelaporan “pedagang kaki lima liar” di portal *Smart City*, tanpa kriteria yang jelas mengenai apa yang diatur maupun tidak, mencerminkan kebijakan yang diskriminatif, alih-alih menjadi solusi kolaboratif dan partisipatif sebagaimana yang akan dipromosikan program Kota Sosial. Ketika ditanya mengenai hal tersebut pada saat kunjungan ke Ruang Kendali Jakarta Smart City sebagai bagian dari Konferensi *Social City*, perwakilan kota menjawab bahwa *Smart City* hanyalah sebuah portal, dan seluruh informasi akan diberikan kepada ‘pihak berwenang’ untuk ditindaklanjuti. Dalam kasus ini, pelaporan “potensi terorisme”, yang merupakan salah satu kriteria di dalam portal *Smart City* – meskipun tanpa penjelasan dan keterangan spesifik tentang definisinya – juga dapat menumbuhkan diskriminasi, prasangka dan stereotipe. Kriteria tersebut dapat digunakan sebagai justifikasi ketika seseorang menuduh tetangganya sebagai terduga teroris, lalu mengirimkan informasi tersebut kepada kepolisian, yang sebenarnya merupakan pihak yang terpisah dari Pemerintah DKI Jakarta. Namun, untuk pedagang kaki lima, yang berwenang adalah Pemkot DKI Jakarta sendiri, yaitu melalui Satpol PP, sehingga jawaban yang kabur dari perwakilan pemerintah saat itu semakin menunjukkan adanya efek diskriminatif dan marjinalisasi dari sistem Jakarta Smart City.

Terlepas dari berbagai kontradiksi dalam pengadopsian *Smart City* oleh pemerintah kota, ruang kendali tersebut adalah salah satu hal yang menjadi kebanggaan Balai Kota (Foto 3). Desain ruang canggih tersebut terdiri dari ruang rapat yang dibatasi kaca, yang transparansinya dapat diatur sesuai keinginan pemimpin rapat. Salah satu sisi menunjukkan bagaimana para karyawan Jakarta Smart City sedang bekerja dengan komputer mereka, sementara sisi lainnya menunjukkan layar lebar yang terdiri dari kombinasi banyak layar datar yang lebih kecil. Layar



Foto 3. Ruang Kendali Jakarta Smart City,  
November 2017  
Foto © Rita Padawangi

tersebut dapat menampilkan gambar CCTV dari berbagai sudut Jakarta, dan juga slide presentasi dari pemimpin rapat. Tampilan khas teknologi canggih ini tidak hanya dilakukan di Jakarta, namun juga menjadi cita-cita di banyak kota di Asia Tenggara, termasuk Bandung, Surabaya, dan Metro Manila.

Terkait inovasi teknologi dan program pemerintah, negara tetangga Singapura seringkali disebut-sebut sebagai sosok ideal yang menjadi dasar visi pembangunan banyak pemerintah kota, termasuk Jakarta.<sup>29</sup> Singapura juga memiliki inisiatif *Smart Nation*, yang dijelaskan oleh pemerintah negara tersebut sebagai “sebuah bangsa di mana masyarakatnya diberdayakan dengan teknologi untuk hidup yang bermakna dan terpenuhi”. Pemberdayaan dengan teknologi didefinisikan sebagai “mengumpulkan kekuatan dari jaringan, data, dan teknologi informasi-komunikasi” untuk “meningkatkan kehidupan, menciptakan peluang

ekonomi, serta membangun masyarakat yang lebih berdekatan”<sup>30</sup>. Inisiatif *Smart Nation* yang mencakup lima domain kunci, yaitu transportasi, rumah dan lingkungan, produktivitas bisnis, kesehatan dan penuaan yang berdaya, serta layanan sektor publik ini menyerukan kepada warga masyarakat dan bisnis untuk bersama-sama menciptakan (*co-create*) solusi atas masalah saat ini, yang untuk mendukungnya, pemerintah telah berjanji untuk mengembangkan infrastruktur dan kebijakan yang mendorong inovasi. “Ko-kreasi” dalam hal ini tidak sama dengan “kolaborasi” yang disebutkan pada sub-bagian sebelumnya, namun didefinisikan melalui peluang dalam inisiatif *Smart Nation*. Hal ini mencakup program *Smart Nation Fellowship* yang diperuntukkan bagi para ilmuwan, ahli teknologi, *programmer* dan insinyur; undangan bermitra untuk mencari solusi melalui *Smart Health*, dan juga pengembangan proposal untuk *Smart Shower Device* yang dapat mengurangi konsumsi air.

Dengan penyebaran kemajuan teknologi yang dapat meningkatkan kondisi hidup dan layanan publik di kota-kota, Singapura semakin mengukuhkan dirinya sebagai model yang menjadi cita-cita pembangunan kota di kawasan Asia maupun dunia. Meskipun di dalam peringkat kota layak tinggal (*liveable city*) yang dilakukan oleh *Economist Intelligence Unit*, Singapura hanya menduduki peringkat 46 dari 140 kota pada 2016, posisi Singapura masih tergolong tinggi dalam kategori tempat tinggal yang aman dan stabil, dengan nilai rata-rata 88,7 dari 100 di dalam indeks tersebut<sup>31</sup>. Pencapaian Singapura tersebut tidak terpisah dari program perumahan publik yang diterapkannya dan telah diakui dunia, yang berhasil menyediakan rumah kepada lebih dari 80% populasi warganya. *Housing and Development Board* (HDB) Singapura, yaitu badan pemerintah yang mengawasi pembangunan, alokasi, dan penjualan perumahan publik, merupakan pengembang terbesar di negara tersebut. Situasi ini menciptakan kondisi kondusif bagi Singapura untuk meluncurkan inisiatif *Smart Nation* khususnya untuk perumahan dan kehidupan, dengan cara seperti pelaksanaan “teknologi cerdas” dan “solusi rumah cerdas” ke berbagai kota dan area HDB. Pemerintah juga mengendalikan secara ketat alokasi lahan, serta memiliki kapasitas untuk menyimpan dokumentasi seluruh lahan yang ada.

Dalam konteks seperti ini, Singapura semakin meninggalkan kota-kota lain di kawasan, seperti Jakarta dan Metro Manila, yang masih menghadapi masalah perumahan yang tidak terjangkau. Pemerintah Jakarta, meskipun terus berusaha mencapai cita-citanya menjadi seperti Singapura dengan menampilkan diri sebagai pembangun banyak rumah susun, tidak memiliki kapasitas untuk menjadi pengembang terbesar di kota ini. Pembangunan di kota masih berada di tangan segelintir oligarki<sup>32</sup> dengan tata ruang yang dapat berubah karena lobi-lobi ekonomi dan politik yang kuat, seperti yang terjadi saat ini dalam kasus proyek reklamasi Teluk Jakarta<sup>33</sup>.

## Bias Perkotaan

Idealisasi Singapura sebagai model juga tidak dapat dipisahkan dari bias perkotaan (*urban*) yang lebih umum. Anggapan bahwa kota sebagai mesin pertumbuhan ekonomi telah mendorong lebih banyak investasi dari berbagai lembaga pembiayaan pembangunan multilateral masuk dan berfokus pada kota. Mayoritas kota bergantung pada pasokan energi, air, dan makanan dari daerah pedalaman atau pedesaan dan produsen pertanian, namun ketergantungan kota pada kebutuhan-kebutuhan utama ini seringkali dianggap wajar. Salah satu pertanyaan yang diajukan pada saat diskusi di Konferensi *Social City*, yaitu mengenai bagaimana kota seharusnya menghadapi kebergantungan masyarakat pedesaan pada subsidi, mencerminkan tren ini. Kota dan urbanisasi diprioritaskan di dalam keputusan pembangunan karena dianggap besar kontribusinya terhadap PDB nasional, di mana kota-kota utama Asia Tenggara seringkali mendominasi<sup>34</sup>. Posisi terhormat kota dalam hierarki kemampuan ekonomi mengaburkan fakta bahwa asumsi ini didasarkan pada sistem ekonomi yang cacat, di mana lingkungan dan pedalaman tidak diakui secara layak. Sebagai contoh, harga tanah dengan bangunan lebih tinggi dibandingkan jika tanah tersebut berupa sawah. Daerah tangkapan air meningkatkan nilai pasar jika dijadikan perumahan, dibandingkan jika tetap menjadi daerah hijau untuk menampung air.

Bias perkotaan mungkin merupakan salah satu masalah paling menantang di dalam program Kota Sosial. Dengan fokusnya pada infrastruktur pembangunan, pelaksanaan program akan terhambat di dalam batasan-batasan administratif kota, yang kemungkinan besar tidak sejalan dengan sistem lingkungan dan alam. Pembangunan partisipatif atau kolaboratif di dalam batas-batas administratif kota tidak dapat menjamin hilangnya bias perkotaan tersebut, meskipun untuk menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Kecuali jika pemahaman akan Kota Sosial mencakup spektrum dan koneksi kota-desa sebagai bagian integral sistem perkotaan, serta mendorong kolaborasi lintas-batas, program ini hanya akan melanjutkan diskoneksi antara banyak

elemen. Tantangan ini terutama sekali bersifat politik, dan hanya dapat diatasi dengan pemikiran yang holistik dan juga komitmen akan keadilan sosial, lingkungan, dan spasial.

## **Kesimpulan: Partisipasi, Kerja Sama dan Inklusi**

Dalam mendorong kolaborasi dan partisipasi masyarakat, program Kota Sosial sangat berpotensi untuk mengajak warga masyarakat untuk kembali terlibat di dalam tata kelola pembuatan kota, dan juga memperluas pemahaman sosial atas kota ke dalam tata kelola politik dan ekonomi saat ini. Namun dalam pelaksanaannya, program Kota Sosial harus selalu menjaga dirinya sebagai antitesis, atau setidaknya sebagai alternatif, bagi konsep pengembangan perkotaan yang individualistik dan semi-otoriter seperti Kota Cerdas yang teknokratik dan neoliberal ataupun Kota Kompetitif. Tantangan yang dihadapi dalam menjaga konsistensi ini setidaknya ada tiga:

Pertama, program Kota Sosial selalu menyatakan diri terhubung dengan proyek-proyek pembangunan, dan bukan sebagai program pendanaan sosial. Relasi dengan proyek pembangunan di satu sisi dapat menjadi berkah, karena dapat mengembalikan fokus kepada visi sosial perkotaan dengan teknologi sebagai instrumen, dan bukan sebagai tujuan akhir dari proyek infrastruktur. Namun, potensi ini juga dapat menjadi kutukan, mengingat proyek infrastruktur dapat terjebak ke dalam pola ketergantungan terhadap mekanisme yang ada saat ini, termasuk bias perkotaan yang memarjinalkan daerah pedesaan dan pedalaman. Meskipun secara ideal, Kota Sosial bersifat trans-sektoral, beberapa proyek kemungkinan telah terikat pada beberapa sektor pemerintahan dan batas administratif tertentu, sementara sektor lainnya bisa jadi lebih terbuka untuk tata kelola partisipatif dan kolaboratif.

Kedua, terdapat aktor-aktor kota yang berkuasa yang kepentingannya dapat terganggu oleh pendekatan tata kelola kolaboratif dan partisipatif, mengingat program tersebut berpotensi menuntut para pemegang *status quo* untuk memberikan alokasi ruang dan sumber daya yang lebih adil.

Para aktor ini berpotensi memberikan pengaruh negatif untuk menghalangi inisiatif Kota Sosial demi mempertahankan kekuasaan mereka. Aktor-aktor yang dimaksud dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, pengembang real estat besar dan berpengaruh yang berfokus pada mega proyek, perusahaan konstruksi yang selama ini selalu mendapatkan proyek pemerintah, atau konsultan dan penyedia layanan yang keuntungannya dapat terpotong akibat perubahan di dalam proses pembangunan. Karena mereka juga merupakan bagian dari kota, program Kota Sosial juga harus memperhitungkan keberadaan mereka, dan siap untuk menghadapi kepentingan-kepentingan tersebut.

Ketiga, visi perkotaan yang eksklusif dan semi-otoriter masih dapat menjadi hegemoni. Sebagaimana dapat diamati pada Pilkada Jakarta 2017, Ahok masih memiliki popularitas bukan hanya karena ia dicitrakan sebagai etnis dan penganut agama minoritas yang dikorbankan, namun juga karena kampanyenya yang menawarkan untuk mengubah Jakarta menjadi seperti Singapura. Idealisasi Singapura ini bahkan dilakukan dengan mempromosikan desain visual saat salah satu acara debat cagub yang menggambarkan Jakarta sebagai kota yang bersih dengan lampu-lampu yang terang benderang, sementara Taman Kalijodo – tempat terjadinya penggusuran paksa ratusan keluarga pada tahun 2016 – menjadi ruang terbuka yang hijau dan rapi. Ahok juga terus menunjukkan papan-papan di Balai Kota yang menunjukkan jumlah penggusuran pada masa pemerintahannya sebagai prestasinya dalam menciptakan Jakarta yang tertib. Semua ini bukan hanya menjadi janji kampanye Ahok, namun juga merupakan gambaran visi ideal dari sebuah kota bagi para pemilihnya. Survei pra-pilkada secara konsisten menunjukkan bahwa mayoritas warga Jakarta merasa puas dengan kinerja Ahok, yang selalu dikaitkan dengan tangan-besinya dalam mengatasi hambatan-hambatan terhadap rencananya, bahkan ketika yang dianggap sebagai hambatan tersebut adalah warga kota Jakarta sendiri. Cita-cita untuk memiliki pemimpin yang kuat namun otoriter tidak hanya mengemuka di Jakarta, namun juga di berbagai daerah lain di Indonesia dan di Asia Tenggara.

Hegemoni tata kelola kota yang eksklusif, tertib dan semi-otoriter mungkin akan menjadi tantangan terberat yang akan dihadapi program Kota Sosial di kawasan ini, karena para pemimpin alternatif yang ada masih belum sanggup melaksanakan proyek pembangunan yang kolaboratif atau bahkan memiliki sikap politik yang juga bertentangan dengan visi inklusif Kota Sosial. Setiap klaim yang mengatakan akan melibatkan kembali warga masyarakat ke dalam tata kelola pembangunan kota harus dianalisis dan dipertanyakan secara kritis, khususnya terkait apakah inisiatif tersebut memberdayakan kelompok paling tercerabut haknya di kota tersebut sehingga dapat memiliki kekuatan negosiasi lebih dalam pengambilan keputusan pembangunan. Di dalam Konferensi *Social City*, Gugun Muhammad menyatakan, “Anda, warga

kelas menengah dan atas, jika tidak memilih mungkin saja tidak masalah. Tapi kami, masyarakat miskin kota, tidak bisa tidak memilih [di dalam pilkada gubernur]. Kami harus mengganti gubernur, dan pilihan kami sangat terbatas, namun kehidupan kami benar-benar terancam jika petahana (Ahok) menang kembali.”

Selain itu, salah satu pembicara konferensi yang berasal dari Pakistan, Arif Hasan, yang merupakan seorang arsitek, perencana kota, aktivis, peneliti sosial, dan penulis, juga berbagi mengenai pengalamannya selama lebih dari 20 tahun sebagai aktivis perumahan di Karachi. Ia mengatakan bahwa situasi bisa saja berubah, namun tidak selalu lebih baik. Walaupun demikian, masyarakat sipil harus tetap hidup dan berjuang.

## Catatan Akhir

1. Georg Simmel, *The Metropolis and Mental Life*, 1901. Richard Sennett, *The Fall of Public Man* (New York: Knopf, 1977).
2. Max Weber, *The City* (New York: Free Press, 1986 [1921]).
3. Neil Brenner and Christian Schmid, "Planetary Urbanization," in *Urban Constellations*, ed. Matthew Gandy, diakses pada 22 Desember 2017, [http://www.urbantheorylab.net/site/assets/files/1016/2011\\_brenner\\_schmid.pdf](http://www.urbantheorylab.net/site/assets/files/1016/2011_brenner_schmid.pdf).
4. Saskia Sassen, *The Global City: New York, London, Tokyo* (Princeton: Princeton University Press), 2001). Brenda S.A. Yeoh, "The Global Cultural City? Spatial Imagineering and Politics in the (Multi)cultural Marketplaces of South-east Asia," *Urban Studies* 42, issue 5-6 (2005), 945-958.
5. Edward W. Soja, "Putting Cities First: Remapping the Origins of Urbanism," in *A Companion to the City*, ed. Gary Bridge and Sophie Watson (Malden, MA: Blackwell Publishing, 2003), 28.
6. Doreen Lee, "Absolute Traffic: Infrastructural Aptitude in Urban Indonesia," *International Journal of Urban and Regional Research* 39, no. 2 (March 2015), 234-250.
7. Peter J. Rimmer and Howard Dick, *The City in Southeast Asia: Patterns, Policies and Processes*, (Singapore: NUS Press, 2009).
8. David Harvey, "From Managerialism to Entrepreneurialism: The Transformation in Urban Governance in Late Capitalism," *Geografiska Annaler. Series B, Human Geography* 71, no. 1 (1989), 3-17.  
Choon Piew Pow, "License to Travel: Policy Assemblage and the 'Singapore Model'," *City* 18, no. 3 (2014), 287-306.
9. Toby Carroll, *Delusions of Development: The World Bank and the Post-Washington Consensus in Southeast Asia* (London: Palgrave Macmillan, 2010).
10. Peter Runkel and Folkert Kiepe, "The Institutional Framework of the Social City Funding Programme and the Need to Extend It," in *The Social City Programme: Wise Urban Development for the Future of Our Cities* (Bonn and Jakarta: Friedrich-Ebert Stiftung, 2016), 1.  
Rene Bormann and Sergio Grassi, "Foreword," in *The Social City Programme: Wise Urban Development for the Future of Our Cities* (Bonn and Jakarta: Friedrich-Ebert Stiftung, 2016), 3.
11. Runkel and Kiepe 2016, 2.
12. *Ibid.*, 9.
13. René Bormann, "The Social Quarter – Policies for Participation, Cohesion and Quality of Life," (Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017).
14. *Ibid.*, 4.
15. Sejauh ini, telah terdapat sejumlah upaya untuk mengusulkan pembangunan perumahan yang partisipatif, kolaboratif, dan inklusif, pada masa pemerintahan Gubernur Joko Widodo (2012-2014) dan Ahok (2014-2017), seperti wacana Kampung Susun untuk Bukit Duri, serta proyek pemindahan Kampung Pulo dan Muara Baru. Namun, seluruh upaya tersebut menghadapi mekanisme yang bergantung pada peraturan perumahan yang ada, yang mencakup janji-janji yang tidak terpenuhi (Bukit Duri), tuduhan ilegal dan pelabelan fasilitator masyarakat sebagai provokator pembuat masalah (Kampung Pulo), serta ditiadakkannya proses partisipatif untuk mendukung kebijakan rusunawa yang ada dan template desain.
16. Rimmer and Dick 2009.
17. Dieqy Hasbi Widhana, "Si Raja Gusur yang Tergusur di Pilkada Jakarta," *Tirto.id* (April 21, 2017), diakses pada 22 Desember 2017, <https://tirto.id/si-raja-gusur-yang-tergusur-di-pilkada-jakarta-cncd>
18. Taufiqurrohman, "Survei: Tingkat Kepuasan Warga Terhadap Ahok 81,5 Persen," *Liputan6* (April 25, 2016), diakses pada 22 Desember 2017, <http://news.liputan6.com/read/2491978/survei-tingkat-kepuasan-warga-terhadap-ahok-815-persen>  
Addi M. Idhom, "Survei Sinergi Data Indonesia Unggulkan Ahok-Djarot," *Tirto.id* (February 11, 2017), diakses pada 22 Desember 2017, <https://tirto.id/survei-sinergi-data-indonesia-unggulkan-ahok-djarot-ci5j>
19. Edward W. Soja, *Seeking Spatial Justice* (Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 2010).
20. Donald Kirk, "Korean Mayor Crusades Against Samsung, Hyundai in Bid to Boost Country's SME," *Forbes* (September 26, 2016), diakses pada 22 Desember 2017 <https://www.forbes.com/sites/donaldkirk/2016/09/26/korean-mayor-crusades-against-samsung-hyundai-in-bid-to-boost-countrys-sme/#11814ac275b5>

21. Walt Patterson, "One Less Nuclear Power Plant," *The Korea Times* (September 23, 2014), diakses pada 22 Desember 2017 [http://www.koreatimes.co.kr/www/news/opinion/2016/02/162\\_165082.html](http://www.koreatimes.co.kr/www/news/opinion/2016/02/162_165082.html)
22. Merlyna Lim, "Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia," *Critical Asian Studies* 49, no. 3 (2017), 411-427.
23. Lim 2017  
Tim Bunnell, Rita Padawangi and Eric C. Thompson, "The politics of learning from a small city: Solo as translocal model and political launch pad," *Regional Studies* (2017), DOI: <https://doi.org/10.1080/00343404.2017.1298087>
24. Kontrak politik juga merupakan salah satu strategi masyarakat miskin kota dalam mengorganisir diri untuk menegosiasikan agenda calon gubernur pada Pilkada 2012, namun kontrak tahun 2017 disusun sebagai kontrak pribadi yang mengikat secara hukum dengan Anies Baswedan. Kontrak yang lebih rinci ini merupakan hasil dari kekecewaan mereka terhadap gubernur petahana, Ahok, yang menurut mereka telah melanggar kontrak politik 2012 karena kontrak tersebut tidak mengikat secara hukum.
25. Bunnell et al. 2017.
26. Rob Kitchin, "The Real-Time City? Big Data and Smart Urbanism," *Geojournal* 79 (2014), 1-14.
27. Rita Padawangi, "The Role of Communities in the Governance of Jakarta's City Food System," in *The Governance of City Food Systems: Case Studies from Around the World*, ed. Mark Deakin, Davide Diamantini and Nunzia Borelli (Milan: Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 2016), 131-130.
28. Ibid.
29. Pow 2014.
30. Smartnation.sg
31. Janice Heng, "Singapore still among world's liveable cities," *The Straits Times* (August 24, 2016), diakses pada 22 Desember 2017, <http://www.straitstimes.com/singapore/housing/spore-still-among-worlds-liveable-cities>
32. Amalinda Savirani, "Jakarta is Still the Oligarchs' Turf," *New Mandala* (June 12, 2017), diakses pada 22 Desember 2017, <http://www.newmandala.org/jakarta-still-oligarchs-turf/>
33. Pada bulan April 2016, salah seorang anggota Dewan Kota Jakarta, Sanusi, ditangkap oleh KPK karena menerima suap dari pengembang Agung Podomoro Land untuk memuluskan persetujuan rencana tata ruang reklamasi pantai Jakarta. Proyek reklamasi tersebut melibatkan pengembang-pengembang besar Jakarta, dan proyek ini ditentang oleh koalisi aktivis dan nelayan karena dampak merugikan yang ditimbulkan pada pencaharian masyarakat dan lingkungan pesisir.
34. Rimmer and Dick 2009.



## Tentang penulis

**Rita Padawangi** adalah seorang Dosen Senior di Singapore University of Social Sciences (SUSS). Ia mendapatkan gelar Doktor di bidang Sosiologi dari Loyola University Chicago pada tahun 2008. Minat penelitiannya mencakup sosiologi arsitektur, pembangunan perkotaan partisipatif, gerakan sosial, dan ruang publik. Saat ini ia menjabat sebagai Regional Facilitator for the Southeast Asia Neighborhoods Network (SEANNET), sebuah program penelitian dan pedagogis yang dijalankan bersama International Institute for Asian Studies (IIAS) yang didanai oleh Henry Luce Foundation. Makalahnya yang berjudul "Water, Water Everywhere: Toward Participatory Solutions to Chronic Urban Flooding in Jakarta" (dengan Mike Douglass) memenangkan Holland Prize untuk makalah terbaik (2015) dari jurnal Pacific Affairs. Rita adalah editor Routledge Handbook of Urbanization in Southeast Asia (2018) and Cities by and for the People in Asia (dengan Yves Cabannes dan Mike Douglass, Amsterdam University Press, 2018).

Pandangan yang dimuat di dalam publikasi ini tidak selalu mencerminkan pandangan Friedrich-Ebert-Stiftung.

## Imprint

©2018

Friedrich-Ebert-Stiftung | Kantor Perwakilan Indonesia  
Jl. Kemang Selatan II No. 2A Jakarta 12730  
Indonesia

Penanggung jawab:

Sergio Grassi | Direktur Kantor Perwakilan

Tel: +62 21 719 37 11

Fax: +62 21 717 913 58

Email: [info@fes.or.id](mailto:info@fes.or.id)

Website: [www.fes-indonesia.org](http://www.fes-indonesia.org)

Penggunaan seluruh media yang dipublikasikan oleh Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) untuk tujuan komersial tidak diperbolehkan tanpa izin tertulis dari FES.

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) adalah yayasan politik tertua di Jerman. Yayasan ini didirikan pada tahun 1925 dan mengambil nama Friedrich Ebert, presiden Jerman pertama yang terpilih secara demokratis. Dengan jejaring internasional yang terdiri dari lebih dari 100 kantor di seluruh dunia, FES berkontribusi mempromosikan nilai-nilai inti sosial demokrasi, yaitu kebebasan, solidaritas, dan keadilan sosial.

FES mendirikan kantor perwakilan resmi di Indonesia pada tahun 1968, dan sejak 2012 bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia. Untuk mencapai keadilan sosial di bidang politik, ekonomi dan masyarakat sebagai salah satu prinsip utama FES di seluruh dunia, FES Indonesia telah melakukan berbagai kegiatan dalam beberapa tahun terakhir untuk mendukung Reformasi Jaminan Sosial, Negara Kesejahteraan, dan Pembangunan Sosial Ekonomi di Indonesia, serta mempromosikan Indonesia sebagai rujukan bagi negara-negara lain di kawasan dan di tingkat internasional dalam hal demokratisasi, pembangunan sosial-ekonomi, dan pembangunan damai.

Penelitian dan publikasi di bawah topik Kota Sosial adalah bagian dari proyek regional Economy of Tomorrow oleh FES di Asia.